



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN



TAHUN
2018

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Urusan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian berada dibawah kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Berdasarkan hal tersebut maka mekanisme pelaporan pada tahun 2018 menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

Tahun Anggaran 2018 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten memiliki 5 Program yang terdiri dari 17 kegiatan serta satu kegiatan Belanja Tidak langsung dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 49.184.390.000,-** (empat puluh Sembilan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), besaran anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar **Rp. 11.622.000.000,-**) (sebelas milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah) dan yang terealisasi sebesar Rp. **10.088.829.424,-** (sepuluh milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau **86.81%**, dan untuk belanja langsung sebanyak 17 kegiatan sebesar **Rp. 37.562.390.000,-** (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan yang teralisasi sebesar Rp. **35.797.307.425,-** (tiga puluh lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) atau **95.30%**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

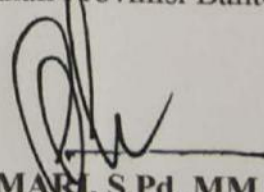
Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian Kinerja Tahun 2018

Program/kegiatan dilaksanakan berdasarkan Visi dan Misi Provinsi Banten dan Program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, berisi tentang pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2018, serta gambaran capaian kinerja Dinas Komunikai, Informatika, Statistik dan Persandian selama kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2020.

Demikian laporan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas terlaksananya penyusunan laporan ini.

Serang, Februari 2018
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Provisini Banten



KOMARI, S.Pd, MM
NIP. 19650307 198902 1 005

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Landasan Hukum	6
C. Permasalahan Utama yang sedang dihadapi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten	10
B. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasui, Informatika Statistik dan Persandian	11
C. Perjanjian Kinerja	12
D. Program dan Indikasi Kegiatan	13
BAN III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja	15
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	30
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategi, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar laporan kinerja didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, laporan suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2018 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pada tahun 2018 penyusunan LKIP telah mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017 s/d 2022 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 s/d 2022 serta Perjanjian Kinerja tahun 2018.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4);
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).
27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 38)

C. Permasalahan Utama yang sedang dihadapi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dihadapkan oleh masalah yang terjadi sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi tantangan dalam proses pemerintahan, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten adalah :

1. Terbatasnya Tenaga teknis dan tenaga ahli bidang teknologi informatika dan komunikasi
2. kendala dan hambatan pada sistem birokrasi administrasi pelaksanaan kegiatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten

Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tidak terlepas dari visi Pemerintah Provinsi Banten yaitu “**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**”.

Penetapan visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi dinas yaitu ”melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ”. Dalam kurun waktu 2017-2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 s/d 2022

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan mengacu pada misi ke I yaitu “**MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**” yang dititikberatkan mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),

dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik.

B. Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 – 2022. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Untuk mewujudkan visi “**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**” melalui 6 (enam) misi, maka dilakukan berlandaskan 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi
2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
3. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan kualitas pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM professional

Dari ke empat strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.

2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan sasaran strategis. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Tercapainya Penyelenggaran Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai IKM (Satuan : Skala 1-4)	2.8
	Pelayanan Pemerintah yang berbasis teknologi dan keterbukaan informasi	Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan : %)	30.26%
		Persentase Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (Satuan : %)	20%
		Persentase Keterediaan Sarana dan prasarana persandian dan keamanan informasi (Satuan : %)	20%
	Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan : %)	50%

No	Program	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sumber Dana
1	Tata Kelola Pemerintahan	4.579.436.000	5.040.538.000	APBD
2	Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	12.165.251.500	12.736.064.600	APBD
3	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	23.363.304.000	18.879.736.400	APBD
4	Tata Kelola Persandian	600.000.000	539.460.000	APBD
5	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	319.405.000	366.591.000	APBD
Jumlah		41.027.396.500	35.797.307.425	APBD

D. Program Dan Indikasi Kegiatan

1. Program dan kegiatan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada APBD Tahun Anggaran 2018 memiliki 5 program pembangunan daerah yang mencakup 17 kegiatan, terdiri dari :

1.1 Program Tata Kelola Pemerintahan;

- 1.1.1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca aset
- 1.1.2 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- 1.1.3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
- 1.1.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 1.1.5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- 1.1.6 Peningkatan Kapasitas Aparatur
- 1.1.7 Koordinasi Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
- 1.1.8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

1.2 Program Pembangunan. Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

1.2.1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Telematika

1.2.2 Pendayagunaan Telematika

1.2.3 Pengelolaan Teknologi Informasi

1.2.4 Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika

1.2.5 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik

1.3 Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik;

1.3.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan

1.3.2 Komunikasi Kelembagaan dan Kemitraan Media

1.4 Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah;

1.4.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

1.5 Program Tata Kelola Persandian.

1.5.1 Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi

BAB III

AKUNTANBILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dan tahunan. Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 49.184.390.000,-** (empat puluh Sembilan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Dari besaran tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian membiayai 18 Kegiatan (termasuk Belanja Tidak Langsung), yang sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), dan Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung adalah sebesar **Rp. 11.622.000.000,-** (sebelas milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 10.088.829.424,-** atau **86.81%** . dan untuk belanja langsung kegiatan sebanyak 17 kegiatan sebesar **Rp. 37.562.390.000,-** (Tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dapat direalisasikan **Rp. 35.797.307.425,-** atau **95.30 %**. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja dapat disajikan dalam table sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Jumlah APBD	49.184.390.000	45.886.136.849	93.29
2	Belanja Tidak Lansung	11.622.000.000	10.088.829.424	86.81
3	Belanja Langsung	37.562.390.000	35.797.307.425	95.30

Kegiatan-kegiatan dalam setiap program tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk mengetahui seberapa besar capaian kinerja dinas selama kurun waktu satu tahun.

1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Perbandingan tersebut dapat dilihat pada table berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai IKM	Skor	2.80	3,19	113,93
2	Pelayanan pemerintahan yang berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	Persentase Ketersediaan perangkat TI	Persentase	30.26	34,32	113,41
		Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase	20,00	24,98	124,92
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana persandian dan keamanan informasi	persentase	20,00	20,00	100,00
3	Dukungan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	persentase	50,00	50,00	100,00

a). Belanja Tidak Langsung

No	Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)
1	Belanja Pegawai	100	100	100	86.81
Jumlah		100	100	100	86.81

b). Belanja Langsung

No	Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (%)
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca aset	100	100	100	100
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	100	100	100	100
3	Pengadaan sarana prasarana kantor	100	98.90	100	93,88
4	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran	100	100	100	91.76
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	100	100	100	92.39
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	100	72.11	100	60.51
7	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	100	81.58	100	76.92
8	Peningkatan Pengelolaan Karsipan dan Layanan Perpustakaan	100	100	100	99.11
9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Telematika	100	100	100	97.11

10	Pendayagunaan Telematika	100	100	100	98.60
11	Pengelolaan Teknologi Informasi	100	100	100	92.82
12	Pengembangan Sarana Aplikasi Informasi	100	98.69	100	74.16
13	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik	100	100	100	97.89
14	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	100	100	100	98.15
15	Komunikasi Kelembagaan dan Kemitraan Media	100	100	100	96.81
16	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	100	100	100	99.69
17	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	100	94.21	100	91.08
Jumlah		100	96.79	100	95.30

2) Realisasi dan Capaian Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja dinas berdasarkan program dapat dilihat pada lampiran, sedangkan capaian masing-masing kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1 Program Tata Kelola Pemerintahan;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian (%)	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Capaian laporan kinerja pemerintah Provinsi Banten	2.80	113.93	3.19	

Anggaran Program Tahun 2018 Rp. 5.040.538.000,-
Realisasi Anggaran Tahun 2018 Rp. 4.517.837.805,-

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja :

Program Tata Kelola Pemerintahan, jumlah kegiatan sebanyak 8 Kegiatan, penanggungjawab sekretariat dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.040.538.000,- dan dana yang sudah teralisasi sebesar Rp. 4.517.837.805,- atau 89.63%, dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Pencapaian indikator dimaksud yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2018 melalui beberapa kegiatan meliputi :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca asset, dengan realisasi anggaran sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan sebanyak 17 Dokumen
 - Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) sebanyak 2 Dokumen
 - Penyusunan Dokumen Laporan Pajak sebanyak 2 Dokumen.
2. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dengan realisasi anggaran sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :
 - Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan sebanyak 3 Dokumen
 - Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan sebanyak 9 Dokumen
 - Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian sebanyak 5 Dokumen.
3. Pengadaan sarana prasarana kantor, dengan realisasi anggaran sebesar 93,88% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, dikarenakan adanya efisiensi anggaran, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

- Belanja Pengadaan Alat Elektronik
 - Pengadaan Komputer, Personel Komputer, Peralatan Peralatan Komputer
 - Belanja Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor.
4. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran., dengan realisasi anggaran sebesar 91,76% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :
- Belanja Barang dan Jasa
 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK
5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan realisasi anggaran sebesar 92,39% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :
- Operasional Kantor Tidak Tetap
 - Penyediaan Barang Habis Pakai
 - Penyediaan Bahan Cetak
 - Penyediaan Makan dan Minum Kantor
 - Penyediaan BBM
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
 - Penyediaan Operasional jasa Kantor/Sewa Gedung
 - Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo
 - Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah
 - Pengelolaan PPID Pembantu
 - Survey Kepuasan Masyarakat.
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi anggaran sebesar 60.51% dari target yang ditetapkan 100%, dikarenakan pada sub tolak ukur Pengiriman Diklat Aparatur tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan adanya jadwal pelaksanaan diklat berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan internal dan adanya rasional anggaran.
7. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar 76,92% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian Provinsi Banten telah melakukan beberapa hasil Kinerja sebagai berikut :

- Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi 59 ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi 59 ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
8. Peningkatan Pengelolaan Karsipan dan Layanan Perpustakaan, dengan realisasi anggaran sebesar 99,11% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan hasil kerja sebagai berikut :
- Pengelolaan Kearsipan Dinamis

2.2 Program Pengembangan Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian (%)	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Pemerintahan yang berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	Persentase Ketersediaan Perangkat TI (Satuan : %)	30.25	113.41	34.32	

Anggaran Program Tahun 2018 Rp. 12.736.064.600,-
 Realisasi Anggran Tahun 2018 Rp. 11.921.455.480,-

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja :

Program Pengembangan Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi , jumlah Kegiatan sebanyak 5 Kegiatan, penanggungjawab program ini terdiri dari 3 bidang yaitu :

1. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 3 kegiatan
 2. Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik sebanyak 1 kegiatan
 3. Bidang Persandian Statistik dan layanan Pengadaan sebanyak 1 Kegiatan
- Dengan jumlah dana sebesar Rp. 12.736.064.600,- dan dana yang sudah teralisasi sebesar Rp. 11.921.455.480,- atau 93.60%,

Pencapaian indikator dimaksud yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2018 melalui beberapa kegiatan meliputi :

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Telematika, dengan realisasi anggaran sebesar 97,11% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Jaringan
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana system Informasi Terpadu (Server data Storage)
 - Pembangunan Banten Command Center – Meeting Room
 - Pengelolaan Jaringan Interkoneksi sebanyak 1.150 Mbps
2. Pendayagunaan Telematika, dengan realisasi anggaran sebesar 98,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :
 - Sosialisasi Antisipasi Kejahatan Dunia Maya di Provinsi Banten untuk 8 Kabupaten/Kota
 - Bimbingan Teknis Konten Website Terpadu sebanyak 100 Orang
 - Sosialisasi Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi sebanyak 100 Orang.
3. Pengelolaan Teknologi Informasi, dengan realisasi anggaran sebesar 92,82% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :
 - Terkelolanya Data Center
 - Terkelola Comand Center
 - Penyusunan SOP Pelaporan/Pengaduan Masyarakat
 - Penyusunan SOP Pengelolaan EMail system
 - Pengelolaan Domain bantenprov.go.id
4. Pengembangan Sarana Aplikasi Informasi, dengan realisasi anggaran sebesar 74.16% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk

mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :

- Pembangunan Sistem Aplikasi terintegrasi dan Pembangunan Linux
- Maintenance Website terpadu bantenprov.go.id
- Bimbingan Teknis E-Sppd sebanyak
- Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Banten Satu Data bagi Aparatur Pemerintah Kab/Kota Seprovinsi Banten

5. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik, dengan realisasi anggaran sebesar 97,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut

- Bimtek Aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) bagi Aparatur Se-Provinsi Banten
- Rapat Koordinasi LPSE SE-Provinsi Banten
- Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
- Bimtek SPSE bagi Penyedia Barang/Jasa

2.3 Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian (%)	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Pemerintahan yang berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan : %)	20,00	124,92	24.98	

Anggaran Program Tahun 2018 Rp. 18.879.736.400,-

Realisasi Anggran Tahun 2018 Rp. 18.501.228.140,-

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja :

Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik, jumlah Kegiatan sebanyak 2 Kegiatan, penanggungjawab program Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik dengan jumlah dana sebesar Rp. 18.879.736.400,- dan dana yang sudah teralisasi sebesar Rp. 18.501.228.140,- atau 98.00 %.

Pencapaian indikator dimaksud yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2018 melalui beberapa kegiatan meliputi :

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan, dengan realisasi anggaran sebesar 98,15% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :

- Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 200 Orang
- Penerbitan Tabloid Menara Banten
- Penyebarluasan Informasi pada Media Luar Ruang sebanyak 54 Materi
- Penyebarluasan Informasi pada Media Cetak sebanyak 337 Tayang
- Penyebarluasan Informasi pada Media Televisi sebanyak 43 Siar
- Tersebarluasnya Informasi melalui Media Radio sebanyak 25 Siar
- Penyebarluasan Informasi pada Media Online sebanyak 30 Kanal
- Penyebarluasan Informasi pada Media Sosial
- Pembuatan Materi Informasi Pembangunan
- Pengelolaan Konten Website Pemerintah Provinsi Banten (bantenprov.go.id)
- Fasilitasi PPID Provinsi Banten

2. Komunikasi Kelembagaan dan Kemitraan Media, dengan realisasi anggaran sebesar 96,61% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :

- Operasional Komisi Informasi Provinsi Banten
- FGD Sepuluh Sektor Pembangunan
- Pameran Foto Pembangunan
- Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan
- Pertemuan Badan koordinasi Keumasan (BAKOHUMAS) se-
Provinsi Banten
- Pertemuan Netizen / Blogger Provinsi Banten

2.4 Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian (%)	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
Dukungan Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	50.00	100	50,00	

Anggaran Program Tahun 2018 Rp. 366.591.000,-
 Realisasi Anggran Tahun 2018 Rp. 365.441.000,-

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja :

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, jumlah Kegiatan sebanyak 1 Kegiatan, penanggungjawab program Bidang Aplikasi Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan dengan jumlah dana sebesar Rp. 366.591.000,- dan dana yang sudah teralisasi sebesar Rp. 365.441.000- atau 99.69%.

Pencapaian indikator dimaksud yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2018 melalui kegiatan :

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan, dengan realisasi anggaran sebesar 99.69% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :
 - Pengelolaan Data Sistem Informasi Banten Satu Data sebanyak 2 Dokumen
 - Rakortek Banten Satu Data

2.5 Program Tata Kelola Persandian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian (%)	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Pemerintahan yang berbasis Teknologi dan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian	20.00	100	20.00	

keterbukaan Informasi	dan Keamanan Informasi (Satuan:%)				
-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Anggaran Program Tahun 2018 Rp. 539.460.000,-
 Realisasi Anggran Tahun 2018 Rp. 491.345.000,-

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja :

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, jumlah Kegiatan sebanyak 1 Kegiatan, penanggungjawab program Bidang Aplikasi Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan dengan jumlah dana sebesar Rp. 539.460.000,- dan dana yang sudah teralisasi sebesar Rp. 491.345.000- atau 91.08%

Pencapaian indikator dimaksud yang telah dilaksanakan oleh Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2018 melalui kegiatan :

1. Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi, dengan realisasi anggaran sebesar 91.08% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, untuk mencapai target tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan beberapa hasil kerja sebagai berikut :
 - Operasional Persandian dan Keamanan Informasi dan Pemeliharaan Alat sandi, Alat Keamanan Informasi dan Alat Sarana Informasi
 - Sterilisasi Penginderaan Ruang Kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten
 - Peningkatan kewaspadaan Keamanan Sektor Keuangan dengan Pengadaan Software Antivirus
 - Pelayanan Informasi, Pengamanan dan Monitoring Data Hari Besar
 - Pembinaan Pengelolaan Keamanan Informasi Instansi Pemerintah oleh ADM Persandian Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-Provinsi Banten
 - Sosialisasi tentang “IT Securty Assisment di Lingkungan Organisasi Pemerintah Provinsi Banten.

B. Realisasi Anggaran

1) Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sesuai dengan rencana strategis telah menetapkan sasaran untuk tahun 2018 sebanyak 3 sasaran strategis yang akan direalisasikan dalam 5 Program yang dijabarkan ke dalam 17 kegiatan.

Berikut rincian Belanja Langsung Perprogram Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja, sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai IKM	Tata Kelola Pemerintahan	5.040.538.000	4.517.837.805	89.63
2	Pelayanan pemerintahan yang berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	Persentase Ketersediaan perangkat TI	Pengembangan, Pendayagunaan Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	12.736.064.600	11.921.455.480	93.60
		Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	18.879.736.400	18.501.228.140	98.00
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana persandian dan keamanan informasi	Tata Kelola Persandian	539.460.000	491.345.000	91.08
3	Dukungan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berkualitas	Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan daerah	Penyediaan Data Pembangunan daerah	366.591.000	365.441.000	99.69

2) Realisasi Anggaran Perprogram dan Kegiatan

Berikut rincian Anggaran per Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran			Ket
		Pagu	Realisasi	%	
1	Tata Kelola Pemerintahan				
	1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	10.000.000	10.000.000	100	
	2. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	74.920.000	74.920.000	100	
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	621.526.000	583.501.000	93.88	
	4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	600.000.000	550.549.100	91.76	
	5. Penyediaan barang dan Jasa Perakantoran	2.862.892.200	2.644.891.545	92.39	
	6. Peningkatan Kapasitas Aparatur	128.699.800	77.873.800	60.51	
	7. Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah	720.000.000	533.802.360	76.92	
	8. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	22.500.000	22.300.000	99.11	
2	Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi				
	9. Pengembangan Sarana dan Prasarna	8.674.512.500	8.423.744.000	97.11	
	10. Pendayagunaan Telematika	188.094.000	185.464.000	98.60	
	11. Pengelolaan Teknologi Informasi	1.622.290.000	1.505.745.000	92.82	
	12. Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika	1.673.668.100	1.241.172.480	74.16	

	13. Layanan Pengadaan barang dan Jasa Elektronik	577.500.000	565.330.000	97.89	
3	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik				
	14. Penyebarluasan Informasi Pembangunan	16.728.896.900	16.419.003.240	98.15	
	15. Komunikasi Kelembagaan dan Kemitraan Media	2.150.839.500	2.082.224.900	96.81	
4	Tata Kelola Persandian				
	16. Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	539.460.000	491.345.000	91.08	
5	Penyediaan Data Pembangunan daerah				
	17. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	366.591.000	365.441.000	99.69	
Jumlah		37.562.390.000	35.797.307.425	95.30	

3) Laporan Realisasi Anggaran

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai	124.800.000	124.800.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	33.930.659.500	32.255.726.425	95.06
3	Belanja Modal	2.506.930.500	3.416.781.000	97.43
Jumlah		37.562.390.000	35.797.307.425	95.30

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan Dinas Komunikas Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dikategorikan **Sangat Baik**

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah dari mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dengan telah terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Banten khususnya pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mendukung pimpinan dalam pemanfaatan dan penggunaan informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

